

RINGKASAN

Nisa Fatnia 210510246 Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe)

(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.H, dan Arif Rahman S.H., M.H)

Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 dalam menyelesaikan dan menangani konflik pertanahan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Peraturan tersebut mengatur tentang penanganan dan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi mengingat masih seringnya terjadi konflik pertanahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dan mengetahui mekanisme, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian, serta penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data melalui literatur-literatur dan penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya efektif. Mekanisme mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengaduan, pengakajian kasus, gelar internal, survey lapangan, dan pelaksanaan mediasi. Hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi yang menyebabkan terhambatnya upaya penyelesaian sengketa, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi tentang mekanisme dan manfaat mediasi kepada masyarakat.

Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar menyediakan papan informasi mengenai mekanisme alur mediasi yang dapat diakses oleh masyarakat supaya masyarakat lebih memahami prosedur yang harus diikuti.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Menteri Agraria, Penyelesaian Sengketa Tanah, Mediasi

SUMMARY

Nisa Fatnia Effectiveness of Minister of Agrarian Affairs/National Land

**210510246 Agency Regulation Number 21 of 2020 in Dispute Resolution
Through Mediation (A Research Study at the National Land
Agency Office of Lhokseumawe City)**

(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.H, and Arif Rahman S.H., M.H)

The effectiveness of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 in resolving and addressing land conflicts is the main focus of this study. The regulation governs the handling and resolution of land disputes through mediation, considering the frequent occurrence of land conflicts in society. This study aims to assess the effectiveness of the regulation in resolving land disputes through mediation at the Land Office of Lhokseumawe City, as well as to understand the mechanisms, obstacles, and efforts involved in the mediation process.

This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. The data collection techniques used in this research are field research, which involves interviews with parties directly involved in the study, and library research, which involves collecting data from literature and previous studies relevant to this research.

The results of the study show that the effectiveness of Regulation Number 21 of 2021 in resolving land disputes through mediation at the Land Office of Lhokseumawe City has not been fully effective. The mediation mechanism at the Lhokseumawe Land Office involves several stages: complaint submission, case review, internal presentation, field survey, and the implementation of mediation. Obstacles encountered include the absence of one of the parties during the mediation process, which hinders dispute resolution efforts, and the lack of public awareness regarding the benefits of mediation as an alternative method of resolving land disputes. Efforts made include increasing public outreach about the mediation mechanism and its benefits.

It is recommended that the Lhokseumawe Land Office provide an information board outlining the mediation process that is accessible to the public so that people can better understand the procedures they need to follow.

Keywords: *Effectiveness, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs, Land Dispute Resolution, Mediation*